BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan fisik, mental, dan sosial yang baik, bukan sekadar bebas dari penyakit, sehingga memungkinkan untuk menjalani hidup yang produktif. Upaya dalam bidang kesehatan mencakup berbagai tindakan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan guna menjaga serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tindakan ini meliputi aspek promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit), rehabilitatif (pemulihan kesehatan) yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Setiap individu secara hukum memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat sebagai pilar utama dalam pembangunan bangsa. Sejalan dengan prinsip bahwa masyarakat yang sehat akan menjadi masyarakat yang kuat, pemerintah berharap setiap individu yang berada dalam kondisi sehat dapat berperan aktif dalam mendukung berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik (Undang-Undang No. 17, 2023).

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kesehatan diperlukan adanya fasilitas kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas kesehatan diartikan sebagai tempat atau alat yang digunakan untuk memberikan layanan kesehatan bagi individu maupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Fasilitas kesehatan yang ideal seharusnya mudah diakses dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Hal ini berorientasi kepada pasien (*patient oriented*) sehingga dalam pelaksanaannya harus ada jaminan terkait kualitas, keamanan, dan efektivitas layanan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas kesehatan dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu tingkat pertama, tingkat lanjut, dan fasilitas penunjang. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mencakup puskesmas, klinik pratama, serta praktek mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Sementara itu, layanan kesehatan spesialis maupun subspecialis termasuk dalam fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Adapun fasilitas

penunjang mencakup laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel dan/atau bank jaringan.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan mencakup pelayanan kefarmasian yang merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait obat dan yang berhubungan dengan kesehatan. Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas menetapkan bahwa standar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kefarmasian, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional demi keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian di puskesmas mencakup kegiatan yang bersifat manajerial (pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai) seperti perencanaan kebutuhan obat, pengajuan permintaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan, serta evaluasi pengelolaan obat. Selain kegiatan yang bersifat manajerial, juga melakukan kegiatan pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite pasien jika merupakan puskesmas rawat inap, Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Pemantauan Terapi Obat (PTO) serta Evaluasi Penggunaan Obat (EPO).

Berdasarkan uraian di atas, mahasiswa program Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Kalijudan yang berlokasi di Jalan Kalijudan No.123, Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 03 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025 dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta pengalaman secara langsung kepada calon Apoteker berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Oleh karena dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa sebagai calon Apoteker dari Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker UKWMS dapat memahami serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri sebagai Apoteker yang profesional dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku di Indonesia.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Kalijudan yakni sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu melakukan pengelolaan obat di puskesmas, mulai dari perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pelaporan.
2. Mahasiswa mampu melakukan *compounding* dan *dispensing* sediaan farmasi dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mahasiswa mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik dalam pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Kalijudan yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pengelolaan distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Mengetahui dan memahami pelaksanaan *compounding* dan *dispensing* sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Memahami dan mampu melakukan komunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat serta tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu menunjukkan sikap kerjasama yang baik dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya.